

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah, dengan berbagai macam bentuk seperti batu bara, minyak bumi, nikel, emas, logam, gas alam dan lainnya. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam ini, maka di Indonesia banyak berdiri industri yang bergerak di sektor pertambangan. Keberadaan perusahaan tambang ini tentu saja memiliki dampak yang ditimbulkan akibat dari aktivitas produksi industrinya, tidak hanya terhadap lingkungan saja tetapi juga pada para pemangku kepentingan (*stakeholder*) seperti masyarakat sekitar, pelanggan, karyawan dan juga para pemegang saham (*shareholder*).

Dampak dari kegiatan produksi perusahaan pertambangan dapat berupa polusi dan juga kerusakan lingkungan ataupun masalah kemasyarakatan serta keselamatan kerja. Contoh kasus polusi dan kerusakan lingkungan yang paling besar yang paling banyak diperbincangkan dunia belakangan ini adalah pencemaran lingkungan yang terjadi Kota Industri Norilsk di Rusia yang sudah di mulai dari tahun 1991 sampai sekarang dimana industry yang ada di kota ini mengeluarkan lebih dari 2 juta ton belerang dan nikeloksida serta 2 ton sulfuroksida ke udara sehingga harapan hidup masyarakat yang tinggal disana 10 tahun lebih rendah (<http://travel.tribunnews.com> 2017). Selanjutnya pada tanggal 5 September 2016 juga diberitakan adanya kebocoran

pipa pabrik perusahaan Norilsk nikel yang mengakibatkan perubahan air sungai Dal'dykan yang berada di wilayah Arktik Rusia menjadi merah seperti darah (<http://www.bbc.com> 2016).

Selain di Rusia, pada tahun 2010, kilang minyak lepas pantai Deepwater Horizon meledak di teluk Meksiko yang menumpahkan minyak sebanyak 4,9 juta barel. Peristiwa ini menyebabkan 11 orang hilang dan tercemarnya air laut (<http://tekno.tempo.co> 2018).

Di Indonesia sendiri pencemaran lingkungan yang baru-baru ini banyak diperbincangkan adalah pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum yang berasal dari industri di Jawa Barat sejak tahun 2013. Sebagian besar industri yang berada di daerah aliran sungai Citarum ini merupakan industri tekstil yang mana dari sebanyak itu perusahaan yang ada disana, hanya sebagian kecil yang memiliki Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) yang memadai. Sedangkan sebagian perusahaan yang tidak memiliki IPAL, limbah produksinya langsung mengalir ke sungai Citarum (<https://ekbis.sindonews.com> 2018). Masih banyak lagi pencemaran-pencemaran lingkungan lainnya yang terjadi, bahkan lumpur Lapindo yang sudah lebih dari 10 tahun belum ada kejelasannya sampai sekarang dan masih menjadi ancaman penyakit bagi warga yang tinggal di sekitar tanggul (<http://www.voaindonesia.com> 2017). Seperti yang kita ketahui lumpur Lapindo ini sudah terjadi sejak tanggal 26 Mei 2006.

Sedangkan untuk kasus kemasyarakatan dan keselamatan kerja adalah kasus yang terjadi pada PT. Freeport dengan masyarakat suku di Papua. Kasus ini menjadi topik yang banyak diperbincangkan baik itu di Indonesia sendiri maupun di luar Indonesia pada tahun 2017 karena adanya perselisihan antara pihak perusahaan dengan pihak

masyarakat sekitar yang disebabkan oleh tindakan perusahaan yang terus membuang limbah di tanah adat Amungme ke tanah suku Komoro (<http://www.voaindonesia.com> 2017). Sedangkan untuk kasus keselamatan kerja perusahaan Freeport ini adalah longsor dan banjir yang menerjang kawasan PT. Freeport kawasan Mil 68-69, Tembagapura Kabupaten Timika, Papua pada tanggal 15 Februari 2016. Walaupun tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini tapi karyawan harus mengungsi dari barak mereka (<https://www.merdeka.com> 2016).

Denga adanya kasus-kasus tersebut tentu saja perusahaan perlu bertanggung jawab dan mengeluarkan biaya-biaya terkait lingkungan yang kemudian diungkapkan dalam bentuk laporan non keuangan yang disebut dengan tanggung jawab sosial perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan ini merupakan bentuk tanggung jawab atau rasa peduli perusahaan terhadap dampak negative aktivitas operasi perusahaan pada lingkungan dan juga masyarakat. Biasanya tanggung jawab sosial diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan, tetapi ada juga perusahaan yang mengungkapkan tanggung jawab sosial ini dalam bentuk laporan yang disebut dengan laporan keberlanjutan.

Di Indonesia, rasa peduli perusahaan terhadap lingkungan sudah mulai terlihat dengan munculnya undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Program Penilaian Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) sudah mulai sejak tahun 1990 dengan nama PROKASIH (Program Kali Bersih) yang kemudian tahun 2002 berganti nama menjadi PROPER dengan tujuan untuk mendorong ketaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup (<http://mu171.wordpress.com> 2019) dan penandatanganan Nota

Kesepahaman (Mou) dengan Badan Lingkungan Hidup (EPA) Amerika Serikat pada Juni 2011 di Jakarta (<http://pslh.ugm.ac.id> 2011). Di bawah ini terlihat jumlah perusahaan yang ikut dalam PROPER dalam lima tahun terakhir.

Tabel 1.1 Daftar perusahaan yang ikut PROPER lima tahun terakhir

Tahun	Jumlah Perusahaan	Peringkat				
		Emas	Hijau	Biru	Merah	Hitam
2014	1908	9	121	1224	516	21
2015	2137	12	108	1406	529	21
2016	1930	12	172	1422	284	5
2017	1819	19	150	1486	130	1
2018	1906	20	155	1454	241	2

Sumber: Data diolah sendiri dari Kementerian Lingkungan Hidup dan kependudukan tahun 2019

Selain PROPER ada juga penilaian untuk laporan keberlanjutan bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara yang diadakan oleh *National Center For Sustainability Reporting* (NCSR). Penghargaan ini dikenal dengan nama ISRA (*Indonesia Sustainability Reporting Award*) dan biasanya diadakan pada tanggal pada tanggal 3 Desember setiap tahunnya yang dimulai pertama kalinya pada tahun 2006 dan pesertanya terus meningkat seperti yang diperlihatkan oleh tabel dibawah ini (ncsr.co.id).

Tabel 1.2 Daftar Perusahaan yang ikut dalam ISRA dalam lima tahun terakhir

Tahun	Jumlah Perusahaan
2014	35
2015	37
2016	50
2017	40
2018	56

Sumber: NSCR (www.ncsr-id.org)

Tidak hanya itu, dalam undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang perusahaan terbatas juga berisi tentang himbauan bahwa di dalam laporan tahunan perusahaan harus berisi minimal laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pada tahun 2017, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengeluarkan Peraturan No.51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan keberlanjutan bagi perusahaan keuangan, emiten dan perusahaan publik dengan tujuan untuk keseimbangan antara aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek lingkungan dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan yang dapat menjaga stabilitas ekonomi.

Menurut Azheri (2011) kesadaran perusahaan dalam meningkatkan tanggung jawab sosial semakin meningkat, hal ini dapat dilihat dari kepedulian masyarakat global untuk membeli dan mengkonsumsi produk yang ramah lingkungan dan diproduksi dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial dan Hak Asasi Manusia (HAM). Tidak hanya masyarakat, kesadaran akan tanggung jawab sosial ini juga mempengaruhi indeks saham untuk perusahaan yang peduli dengan tanggung jawab sosialnya seperti yang terjadi di *New York Stock Exchange* sejak tahun 1999 yang membentuk *Dow Jones Sustainability Index* (DJSI) yang ditujukan bagi saham-saham perusahaan yang dikategorikan memiliki nilai *corporate sustainability* dan tanggung jawab sosial merupakan salah satu indikatornya.

Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 14 Desember 2017, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sudah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Laporan keberlanjutan mulai diungkapkan pada tahun 2006, ada sebanyak 3 perusahaan yang mengungkapkan dan kemudian terus meningkat sampai 49 perusahaan pada akhir tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran

perusahaan di Indonesia akan pengungkapan tanggung jawab sosial ini sudah mulai membaik dan mengungkapkan tanggung jawab sosial mereka sesuai dengan standar global yang sudah ada.

Global Reporting Initiative (GRI) merupakan salah satu standar yang dipakai dalam mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan ini, dimana di dalam GRI disebutkan bahwa kategori dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan ini ada enam yaitu pengungkapan kinerja ekonomi, pengungkapan kinerja lingkungan, pengungkapan kinerja sosial, praktik kerja dan ketenagakerjaan, Hak Asasi Manusia (HAM) dan pengungkapan tanggung jawab terhadap produk. Selain GRI, perusahaan juga dapat menggunakan standar lain seperti OECD untuk perusahaan multi nasional dan juga standar ISO26000.

Penelitian terdahulu yang membahas tentang luas pengungkapan tanggung jawab sosial ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Yanti (2018), dimana dia meneliti tentang pengaruh karakteristik *corporate governance* dan profitabilitas terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sampel dalam penelitian ini adalah 19 bank yang terdaftar di BEI periode 2015-2016, total data yang di observasi adalah sebanyak 38 data. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa sebanyak 76,8% pengungkapan tanggung jawab sosial dipengaruhi oleh oleh tiga variabel yaitu rapat umum pemegang saham (RUPS), dewan direksi, dewan komisaris dan komite audit dan profitabilitas (ROE), sedangkan 23,3% sisanya dapat dipengaruhi oleh variabel lain. Pada penelitian ini, Yanti juga menjelaskan bahwa komite audit sangat berpengaruh dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Semakin baik komite audit

dalam perusahaan maka akan semakin baik pula pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaannya.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Maria (2018) tentang analisis laporan keberlanjutan berdasarkan GRI untuk perusahaan sektor publik yang ada di Portugal untuk tahun 2008-2012. Sampel penelitian berjumlah 45 dari 9 perusahaan sektor publik di Portugal. Hasil penelitian Maria adalah perusahaan publik yang ada di Portugal secara luas mengungkapkan tanggung jawab sosial sesuai dengan GRI, meskipun indikator pengungkapannya berbeda disetiap industri tetapi pengungkapan tanggung jawab sosial yang diungkapkan berada di atas 75%. Pada penelitian ini, maria menyatakan bahwa pengungkapan untuk kategori ekonomi yang paling banyak diungkapkan, sedangkan untuk kategori lingkungan merupakan kategori yang paling sedikit yang diungkapkan. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan publik yang ada di Portugal meningkat terus menerus mulai dari tahun 2008 sampai tahun 2012.

Anwar (2018) juga meneliti tentang pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada perbankan syariah dalam prospektif syariah *enterprise theory*. Sampel dalam penelitian ini adalah PT. Bank BRI Syariah Palopo dimana terdapat 92 kuisoner yang dibagikan ke 92 responden yang merupakan nasabah bank. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa penggunaan *enterprise theory* hanya berpengaruh sebesar 14% terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial sedangkan 86% dipengaruhi oleh variabel lain. Pada penelitian yang dilakukan oleh Anwar dapat diketahui tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial pada PT Bank BRI syariah masih rendah.

Sedang Sholihin (2018) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial untuk perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-2015. Sampel penelitiannya adalah sebanyak 106 dari 53 perusahaan. Hasil penelitian Sholihin adalah pengungkapan tanggung jawab sosial untuk perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI selama tahun 2014-2015 hanya sebesar 26,4%. Hal ini terjadi karena pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan juga faktor eksternal, dimana pada penelitian ini dijelaskan bahwa kepemilikan institusi dan ukuran perusahaan sangat berpengaruh dalam pengungkapan tanggung jawab sosial sedangkan dewan komisaris dan komite audit sama sekali tidak berpengaruh dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan perusahaan sektor pertambangan di Indonesia juga belum konsisten. Peneliti tertarik mengambil sektor pertambangan sebagai sampel penelitian karena operasional perusahaan sektor pertambangan ini yang memiliki dampak secara langsung terhadap lingkungan, masyarakat ataupun dengan pekerjanya.

Dengan adanya penjelasan dalam latar belakang diatas, maka peneliti sangat tertarik untuk meneliti tentang tanggung jawab sosial perusahaan sektor pertambangan dengan judul “ **ANALISIS TINGKAT PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DALAM LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015-2017**”.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menganalisa sejauh mana tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial yang diungkapkan oleh perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI dari tahun 2015 sampai tahun 2017 di dalam laporan tahunan yang mereka terbitkan.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa banyak kategori pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilaporkan dalam laporan tahunan perusahaan sektor pertambangan berdasarkan GRI-G4?
2. Bagaimana tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan perusahaan sektor pertambangan berdasarkan GRI-G4 setiap tahunnya?
3. Apa saja kategori pengungkapan tanggung jawab sosial yang paling banyak diungkapkan oleh perusahaan sektor perambangan yang terdaftar di BEI mulai tahun 2015-2017?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji seberapa luas tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan GRI-G4 dalam laporan tahunan yang diungkapkan oleh perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017.

2. Untuk menilai tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017.
3. Untuk mengkaji kategori apa saja yang paling banyak diungkapkan oleh perusahaan sektor pertambangan dalam pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan perusahaan.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Peneliti berharap bahwa penelitian yang peneliti lakukan ini dapat membantu berbagai pihak yang membutuhkan seperti:

1. Bagi penulis dan pembaca, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan.
2. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan yang berguna bagi perusahaan sehingga dapat membantu perusahaan dalam mempertimbangkan keputusan bisnis.
3. Bagi masyarakat dan peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bahan untuk referensi

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang mendasari penelitian dan pengembangan kerangka pemikiran serta penelitian-penelitian terdahulu.

Bab III: METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan bentuk penelitian, populasi dan sampel, data dan teknik pengambilan data dan variabel penelitian.

Bab IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai hasil dari penelitian yang menjadi inti dalam penulisan skripsi.

Bab V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh setelah dilakukan penelitian, keterbatasan serta saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan maupun peneliti selanjutnya.



